



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231.
Telepon (0752) 93947 Faksimile. 90810
Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2027

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN DIANALISIS.	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJAJARAN (AKSES, PARTISIPASI, KONTROL, MANFAAT)	SEBAB KESEJAJARAN INTERNAL	SEBAB KESEJAJARAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara terpadu dan terkoordinasi, PUG menjadi bagian integral dalam proses pembangunan daerah serta tidak terpisahkan dari seluruh tahapan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta diperkuat dengan regulasi turunannya, proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan perspektif gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	1 Aspek Akses, Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat diakses baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) ataupun Rencana Kerja (Renja), disamping itu Setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, dan pemuda.	1 Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD	1 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran program kerja dinas yang responsif gender	1 Mengakomodir dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang responsif gender;	Dokumen perencanaan dan penganggaran program kerja dinas yang responsif gender.	Meningkatnya transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Unsur masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan meliputi masyarakat (RT/RW/Fasilitator Kelurahan), perwakilan perempuan, tokoh masyarakat, serta organisasi pemuda. Proses perencanaan dilaksanakan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang diawali dari tingkat kelurahan (mufakat RW) hingga Musrenbang kecamatan. Proses ini bertujuan untuk menjangkau kebutuhan pembangunan dari tingkat akar rumput, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta responsif gender.	2 Aspek Kontrol/ Kewenangan, Pengendalian penerapan dalam mengakomodir pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui evaluasi berkala setiap triwulan, dalam bentuk pelaporan akan kegiatan yang didalamnya disisipkan amanat pemberian kesempatan yang sama dalam pengarusutamaan gender.	2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan, dimana target pelayanan dianggap homogen tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki.	2 Budaya kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat		2 Menyusun dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang responsif gender pada sub-kegiatan yang berperan langsung dalam pengarusutamaan gender;		
Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berdasarkan kondisi akhir Tahun 2025, capaian kinerja indikator "Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun" telah mencapai 100%, dengan realisasi sebanyak 16 dokumen perencanaan.	3 Aspek Partisipasi, Partisipasi aktif dilaksanakan melalui sub-kegiatan rekonstruksi jalan, dan juga pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk mengakomodir kebutuhan akan pengarusutamaan gender. Berdasarkan pelaksanaan verifikasi usulan musrenbang dan pikir yang dilaksanakan, terlihat bahwa hampir dapat dikatakan berimbang antara perempuan dan laki-laki: lurah dan fasilitator kelurahan, yang berasal dari LPM atau Petugas Yandu.				3 Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan sub-kegiatan yang responsif gender.		
		4 Aspek Manfaat, Dengan mengakomodir pengarusutamaan gender pada dokumen perencanaan dinas, maka perencanaan pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang Kota Payakumbuh berupaya dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.						

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh



MUSLIM, ST. M.ST
NIP. 19750402 200003 1 005



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,

Telepon (0752) 93947 Faksimile. 90810

Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2027

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN DIANALISIS.	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJANGKAPAN (AKSES, PARTISIPASI, KONTROL, MANFAAT)	SEBAB KESEJANGKAPAN INTERNAL	SEBAB KESEJANGKAPAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Dalam perspektif pengarusutamaan gender, pengelolaan irigasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis infrastruktur, tetapi juga menyangkut akses, partisipasi, dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh pelaku pertanian, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan, yang juga berperan dalam kegiatan pertanian dan pengelolaan hasil, seringkali memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, informasi, serta keterlibatan dalam kelembagaan pengelola irigasi seperti P3A/GP3A.	1 Aspek Akses, Perempuan memiliki akses terbatas terhadap informasi teknis irigasi serta minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga irigasi (P3A/GP3A). Lahan yang dikelola berada di lokasi yang kurang terjangkau air	1 Komite irigasi, kelompok tani, dan musyawarah desa umumnya dikuasai oleh laki-laki. Perempuan tidak diberi ruang yang setara	1 Keterbatasan Koordinasi Antar Sektor, Koordinasi yang lemah ini menyebabkan kelompok tertentu tertinggal dalam akses manfaat irigasi.	Meningkatkan fungsi dan layanan jaringan irigasi permukaan dan Meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan sistem irigasi dengan penerapan pendekatan	1 Rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi di daerah irigasi prioritas.	Panjang saluran irigasi yang dibangun / direhabilitasi	Peningkatan produktivitas pertanian di daerah layanan irigasi
Kegiatan Pengembangan dan Pengolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 ha dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jaringan irigasi yang diikuti dengan penguatan kelembagaan diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam pengelolaan irigasi, meningkatkan akses terhadap sumber daya air, serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.	2 Aspek Kontrol/ Kewenangan, Laki-laki umumnya memiliki atau menguasai lahan pertanian, sehingga memiliki hak lebih besar dalam menentukan kebutuhan irigasi. Perempuan yang hanya sebagai "pengelola" sering tidak punya kuasa atas keputusan teknis atau lokasi jaringan.	2 Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur umum, khususnya IPeningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2 Masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam perencanaan atau pengawasan proyek irigasi, sehingga kebutuhan kelompok tertentu (misalnya petani kecil, perempuan, atau komunitas adat) tidak terakomodasi.	partisipatif bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi.	2 Penguatan kelembagaan petani (P3A) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah struktur irigasi yang diperbaiki (pintu air, gorong-gorong, dsb)	Stabilitas ketersediaan air irigasi sepanjang musim tanam
Sub-Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Berdasarkan kondisi Tahun 2025, panjang jaringan irigasi yang telah ditingkatkan di Kota Payakumbuh mencapai 59 km. Persentase jaringan irigasi dengan kinerja baik tercatat sebesar 75,29%, sedangkan persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik mencapai 84,26%. Selain itu, persentase kelompok P3A/GP3A yang aktif sebesar 80%	3 Aspek Partisipasi, Adanya anggapan bahwa infrastruktur dan teknis irigasi adalah "urusan laki-laki" menyebabkan perempuan enggan atau tidak diberi ruang untuk ikut serta dalam proyek peningkatan irigasi.				3 Pemantauan dan evaluasi berbasis data spasial untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat	Jumlah daerah irigasi (DI) yang fungsional kembali	Peningkatan pendapatan petani pengguna irigasi
		4 Aspek Manfaat, Irigasi yang baik meningkatkan hasil pertanian, dan ini berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga. Karena perempuan juga berkontribusi dalam proses pertanian, mereka turut merasakan manfaat ekonomi ini.						

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh



MUSLIM, ST. M.SI

NIP. 19750402 200003 1 005



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,

Telepon (0752) 93947 Faxsimile. 90810

Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2027

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN DIANALISIS.	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJANGKAPAN (AKSES, PARTISIPASI, KONTROL, MANFAAT)	SEBAB KESEJANGKAPAN INTERNAL	SEBAB KESEJANGKAPAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), memiliki peran penting dalam mewujudkan infrastruktur yang aman, nyaman, dan bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif pengarusutamaan gender, ketersediaan penerangan jalan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan rasa aman, terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan saat beraktivitas di ruang publik, khususnya pada malam hari. Keterbatasan akses terhadap penerangan jalan yang memadai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas, serta membatasi mobilitas dan partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.	1 Aspek Akses, Penerangan Jalan Umum yang ada di Kota Payakumbuh tersebar di jalan utama serta jalan sekunder agar mampu menerangi ruas jalan saat malam hari. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya tindak kejahatan yang notabene sering dialami oleh perempuan.	1 Masih banyaknya ruas jalan yang belum diterangi PJU mengakibatkan tindakan kriminal, khususnya terhadap perempuan masih marak terjadi.	1 Kurang koordinasi antar lembaga membuat pelaksanaan pengadaan lampu jalan kurang diakomodir	Terwujudnya Penyediaan Lampu Jalan dan Meningkatnya Keamanan Pengendara dalam pemanfaatan pembangunan yang responsif gender	1 Penambahan titik-titik lampu jalan hingga ke bagian yang rawan kejahatan dan kenakalan remaja	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan, Pengadaan Lampu Jalan, Pembangunan Trotoar dan Pemeliharaan Trotoar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Berdasarkan capaian pelaksanaan anggaran Tahun 2025, persentase jalan yang telah dilayani PJU mencapai 52,53%, dengan panjang PJU yang dipelihara sepanjang 660 meter. Selain itu, pengadaan lampu jalan telah dilaksanakan pada 160 titik yang tersebar di ruas-ruas jalan Kota Payakumbuh. Pada subkegiatan ini juga dilakukan rekonstruksi jalan sepanjang 1,31 km serta pemeliharaan trotoar sepanjang 115 meter.	2 Aspek Kontrol/ Kewenangan, Perempuan memiliki kerentanan dalam hal kejahatan yang mayoritas dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan penerangan di tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadinya kejahatan. Penerangan jalan umum juga sangat diperlukan di daerah-daerah strategis dengan arus lalu lintas yang sibuk.	2 Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur umum, khususnya lampu jalan	2 Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur umum, khususnya lampu jalan		2 Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap lampu-lampu jalan yang telah ada		
Sub-Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang tidak hanya berorientasi pada konektivitas, tetapi juga pada aspek keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas yang responsif gender. Ke depan, peningkatan cakupan PJU serta penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai perlu terus dioptimalkan guna mendukung terwujudnya ruang publik yang aman, nyaman dan setara bagi seluruh masyarakat.	3 Aspek Partisipasi, Setiap elemen masyarakat bertanggung jawab atas keutuhan keberadaan PJU sebagai infrastruktur umum yang sangat penting keberadaannya. 4 Aspek Manfaat, Keberadaan penerangan jalan umum memberikan dampak yang sangat penting dalam arus lalu lintas warga Kota Payakumbuh khususnya di malam hari. Namun masih ada ruas-ruas jalan di wilayah kota masih belum memiliki penerangan sehingga masih ada potensi kejahatan dan kenakalan remaja di kawasan tersebut.				3 Memberikan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat terkait upaya memelihara infrastruktur umum khususnya lampu jalan		

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh



MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,

Telepon (0752) 93947 Faksimile. 90810

Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2027

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN DIANALISIS.	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJAJARAN (AKSES, PARTISIPASI, KONTROL, MANFAAT)	SEBAB KESEJAJARAN INTERNAL	SEBAB KESEJAJARAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Subkegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola sektor konstruksi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu fokus pelaksanaan kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi badan usaha jasa konstruksi. Penerapan SMAP menjadi penting dalam meminimalisir praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa konstruksi.	1 Aspek Akses, Kurangnya Data Terpilah Gender sehingga menghambat identifikasi kebutuhan spesifik perempuan. Hal ini menyebabkan program yang disusun kurang mengakomodir perempuan, sehingga akses mereka terhadap pelatihan dan sertifikasi menjadi terbatas	1 Kelembagaan tidak memiliki data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam pelatihan, rekrutmen, dan peningkatan kapasitas.	1 Tidak adanya kuota atau insentif yang mendorong keterlibatan perempuan dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan Badan usaha jasa konstruksi	Mewujudkan Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Inklusif Gender dan Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Konstruksi	1 Penguatan Regulasi dan Kebijakan Internal	Tersusunnya kebijakan internal pembinaan jasa konstruksi yang responsif gender,	Meningkatnya kapasitas kelembagaan jasa konstruksi yang responsif gender
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian, mengingat masih terdapat kesenjangan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Hal ini tercermin dari rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi yang belum sepenuhnya optimal, serta perlunya peningkatan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengembangan kapasitas di sektor jasa konstruksi. Dalam konteks pengarusutamaan gender, kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi yang lebih inklusif serta memberikan kesempatan yang setara dalam peningkatan kompetensi dan penguatan kelembagaan.	2 Aspek Kontrol/ Kewenangan, Memonitor sejauh mana perempuan dilibatkan dalam proses pelatihan, sertifikasi, manajemen proyek, dan kepemimpinan kelembagaan.	2 Akibatnya, tidak ada landasan kuat untuk menyusun kebijakan atau mengevaluasi kesetaraan gender secara objektif	2 Lemahnya sinergi antara lembaga pembinaan konstruksi dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan masyarakat sipil yang fokus pada isu gender.		2 Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas SDM	Terselenggaranya pelatihan teknis dan manajerial untuk peningkatan SDM,	Terwujudnya partisipasi aktif perempuan dalam sektor jasa konstruksi
Sub-Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap lembaga jasa konstruksi tercatat sebanyak 109 lembaga, dengan rasio tenaga operator/teknisi/analisis bersertifikat kompetensi mencapai 73%. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan, serta mendorong kinerja sektor jasa konstruksi.	3 Aspek Partisipasi, Meningkatkan jumlah dan peran perempuan dalam kegiatan pelatihan, sertifikasi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan organisasi konstruksi.				3 Kampanye dan Advokasi Kesetaraan Gender di Sektor Konstruksi serta Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Antar Lembaga	Tersedianya data terpilah gender tenaga kerja konstruksi daerah	Meningkatnya kesadaran dan komitmen pimpinan terhadap isu gender di sektor konstruksi
		4 Aspek Manfaat, Terwujudnya lembaga jasa konstruksi yang inklusif dan responsif gender., Adanya kebijakan internal kelembagaan yang mendukung kesetaraan gender.					Terjalinnnya kerja sama lintas sektor untuk peningkatan kapasitas kelembagaan	Terwujudnya kemitraan lintas sektor dalam pengarusutamaan gender konstruksi

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh



MUSLIM, ST. M.SI

NIP. 19750402 200003 1 005



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231.
Telepon (0752) 93947 Faksimile. 90810
Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2027

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN DIANALISIS.	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN (AKSES, PARTISIPASI, KONTROL, MANFAAT)	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional serta kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif pengarusutamaan gender, ketersediaan sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga harus mampu menjamin kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kondisi bangunan dan fasilitas yang tidak optimal berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, membatasi akses, serta menurunkan kualitas pelayanan bagi kelompok rentan. Pelaksanaan subkegiatan ini mencakup pemeliharaan dan rehabilitasi berbagai sarana pendukung, seperti genset, alat pendingin (AC), komputer, serta peralatan rumah tangga lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kondisi bangunan tetap optimal, peralatan berfungsi dengan baik, memperpanjang umur pakai, serta mendukung kelancaran operasional kantor.	1 Aspek Akses, Akses Terbatas Perempuan terhadap Informasi dan Proses Pengadaan sehingga akses mereka terhadap informasi mengenai pemeliharaan alat atau fasilitas kantor menjadi terbatas dan Keterbatasan Keterwakilan dalam Tim Perencana dan Evaluator Tim yang menyusun RKA/RKPD atau tim pemeliharaan barang dan fasilitas jarang mencakup keterwakilan gender secara seimbang, sehingga perspektif perempuan tidak terakomodasi.	1 Adanya persepsi tradisional yang menganggap tugas pemeliharaan fasilitas sebagai domain laki-laki dapat menghambat partisipasi perempuan dalam proses tersebut	1 Belanja pemeliharaan sering kali direncanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender dari masyarakat pengguna. Akibatnya, fasilitas yang dipelihara mungkin tidak memenuhi kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan secara adil	Memperbaiki dan memperbarui sarana serta prasarana, gedung kantor dapat mendukung kelancaran aktivitas kerja, sehingga meningkatkan efisiensi operasional organisasi serta Mengukur peningkatan jumlah fasilitas yang memenuhi standar responsif gender.	1 Mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi fasilitas yang mendukung kebutuhan gender, seperti pembangunan ruang laktasi dan perbaikan aksesibilitas	Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas pemeliharaan alat dan fasilitas kantor dalam memenuhi kebutuhan gender. Monitoring ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan kesetaraan gender	Menyusun laporan kinerja yang mencakup analisis gender, sehingga transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya pengarusutamaan gender dalam pemeliharaan fasilitas dapat terjaga
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Aspek Kontrol/ Kewenangan, Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang Gender di Kalangan Pengambil Kebijakan, Banyak aparat pemerintah yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep gender dan Budaya Patriarki dan Stereotipe Gender termasuk Norma sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berhak atas kontrol anggaran dapat menghambat perempuan dalam mengakses kewenangan terkait pengelolaan belanja	2 Keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya pengarusutamaan gender dalam pengelolaan fasilitas kantor menyebabkan isu ini kurang mendapat perhatian dalam praktik sehari-hari	2 Mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemeliharaan fasilitas untuk memastikan perspektif mereka terwakili		2 Membangun atau memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor		
Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3 Aspek Partisipasi, Perempuan lebih sering ditempatkan di posisi administratif atau pendukung, yang kurang terlibat langsung dalam perencanaan serta Dominasi laki-laki dalam posisi strategis dan teknis (seperti teknis, pengadaan, logistik) membuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait belanja dan pemeliharaan alat kantor/rumah tangga menjadi rendah				3 Menyusun laporan pelaksanaan rehabilitasi yang memuat capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan, serta mempublikasikannya kepada seluruh pegawai untuk memastikan transparansi		
		4 Aspek Manfaat, Keterlibatan Perempuan dalam Evaluasi Manfaat jarang dapat dilibatkan dalam proses umpan balik atau penilaian kebutuhan, mereka juga pengguna aktif, terutama untuk area seperti dapur kantor, ruang arsip, atau ruang pelayanan administrasi.						



Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,
Telepon (0752) 93947 Faksimile 90810
Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2027

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN DIANALISIS.	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJANGKAPAN (AKSES, PARTISIPASI, KONTROL, MANFAAT)	SEBAB KESEJANGKAPAN INTERNAL	SEBAB KESEJANGKAPAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME
Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses air minum yang aman dan layak. Dalam perspektif pengarusutamaan gender, akses terhadap air minum memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rumah tangga, di mana perempuan umumnya memiliki peran besar dalam pengelolaan air untuk keperluan Rumah Tangga. Keterbatasan akses air bersih dapat meningkatkan beban kerja perempuan sebagai ibu rumah tangga, menurunkan kualitas kesehatan keluarga, serta dapat berpotensi membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi.	1 Aspek Akses, Ketimpangan Peran dan Tanggung Jawab Gender dalam Rumah Tangga, Bertanggung jawab atas pemenuhan air rumah tangga. Namun, mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan terkait proyek SPAM, Perempuan sering tidak dilibatkan dalam forum musyawarah, sehingga kebutuhan spesifik mereka seperti lokasi titik sambungan rumah, fasilitas sanitasi, atau pengaturan jam distribusi tidak	1 Banyak lembaga pengelola SPAM, seperti PDAM atau BUMDes Air, masih didominasi oleh laki-laki di posisi penting. Kurangnya representasi perempuan di level pengelolaan atau pengambilan keputusan menyebabkan perspektif gender sering diabaikan dalam perencanaan dan implementasi proyek SPAM	1 Kesenjangan Akses antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan dan dibanyak wilayah perkotaan yang berkembang pesat, perumahan informal atau kumuh sering kali tidak terhubung dengan jaringan SPAM	Penyediaan Akses Air Bersih yang Merata bertujuan agar perempuan memiliki posisi yang setara dalam struktur pengelolaan air bersih, baik di tingkat kebijakan, operasional, maupun pengawasan.	1 Penguatan Infrastruktur dan Akses Air Bersih di Daerah Terpencil	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Jaringan Perpipaan serta sumber Air yang Berfungsi dan Terstandarisasi, Total panjang jaringan perpipaan yang telah dibangun atau diperluas untuk menyuplai air ke rumah tangga dan Jumlah Titik Layanan Publik yang Mendapatkan Akses Air	Meningkatnya Aksesibilitas Air Bersih yang Merata dan Kesehatan Masyarakat serta Perbaikan Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Berdasarkan Tahun Anggaran 2025, persentase akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan di Kota Payakumbuh telah mencapai 90,69% dari total jumlah penduduk sebanyak 150.869 jiwa. Hingga tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas PUPR dan PDAM telah merealisasikan penyalangan instalasi air bersih ke rumah-rumah sebanyak 31.710 sambungan rumah	2 Aspek Kontrol/ Kewenangan, Minimnya Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan sering kali tidak memiliki posisi strategis dalam lembaga pengelola air minum (PDAM, Kelompok Pengelola SPAM). Akibatnya, suara mereka tidak terwakili dalam keputusan teknis, tarif, cakupan layanan, dan prioritas pembangunan	2 Program sosialisasi atau pelatihan terkait SPAM sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan waktu dan tempat bagi perempuan, atau bahkan tidak menasar kelompok perempuan secara khusus. Informasi yang tidak mudah diakses atau sulit dipahami oleh perempuan mengakibatkan keterbatasan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan air	2 Program SPAM sering kali tidak menyebarkan informasi yang ramah gender atau terjangkau bagi semua anggota masyarakat, terutama perempuan, yang mungkin memiliki akses terbatas ke media atau forum pengambilan keputusan, kurang memahami hak mereka dalam akses air bersih.		2 Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan dan Pengelolaan SPAM		
Sub-Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		3 Aspek Partisipasi, Perempuan Tidak Terlibat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan sehingga kebijakan terkait distribusi dan perluasan jaringan air. Mereka cenderung tidak diajak berdiskusi dalam forum formal, meskipun mereka adalah pengguna utama air				3 Peningkatan Akses Informasi dan Sosialisasi SPAM dan Penyediaan Fasilitas Sanitasi yang Ramah Perempuan		
		4 Aspek Manfaat, Ketika sistem penyediaan air tidak memperhitungkan kedekatan sumber air dengan rumah atau tidak menjangkau daerah terpencil, manfaatnya cenderung lebih dirasakan oleh laki-laki, sementara perempuan tetap harus menghabiskan waktu yang banyak untuk mengambil air serta Akses Terbatas kepada Air Bersih di Perumahan						



Payakumbuh, 31 Maret 2026

Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh

MUSLIM, ST. M.SI

NIP. 19750402 200003 1 005